

PN3 - BAB IV

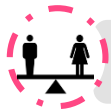
Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

**Kedeputian Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan
dan
Kedeputian Kependudukan dan Ketenagakerjaan**

Tema RPJMN IV 2020-2024

*“Indonesia Berpenghasilan
Menengah-Tinggi yang Sejahtera,
Adil, dan Berkesinambungan”*

Pengarusutamaan RPJMN IV 2020-2024



Kesetaraan
Gender



Tata Kelola
(Governance)



Pembangunan
Berkelanjutan



Modal Sosial Budaya



Pembangunan
Transformasi Digital

Kaidah Pembangunan RPJMN IV 2020-2024



Membangun
Kemandirian



Menjamin
Keadilan



Menjaga
Keberlanjutan

Prioritas RPJMN IV 2020-2024



1. Memperkuat Ketahanan
Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang
Berkualitas



2. Mengembangkan Wilayah
untuk Mengurangi Kesenjangan
dan Menjamin Pemerataan



3. Meningkatkan SDM
berkualitas dan berdaya
saing



4. Revolusi Mental
dan Pembangunan
Kebudayaan



5. Memperkuat Infrastruktur
Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar



6. Membangun Lingkuagn
Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim



7. Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan
Publik

KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN MANUSIA

Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Sehat Cerdas Adaptif Kreatif Inovatif Terampil Bermartabat

Layanan Dasar &
Perlindungan Sosial

Pendidikan

Kesehatan

Perlindungan
Sosial

Kualitas Anak,
Perempuan Pemuda
Pengentasan Kemiskinan

Tata Kelola
Kependudukan

Produktivitas

Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan
Tinggi

IPTEK-Inovasi

Prestasi
Olahraga

Pembangunan
Karakter

Revolusi Mental dan Pembinaan
Ideologi Pancasila

Pemajuan dan
Pelestarian
Kebudayaan

Memperkuat
Moderasi Beragama
Budaya Literasi, Inovasi
dan Kreativitas

Pertumbuhan penduduk seimbang

Bab IV Meningkatkan
SDM Berkualitas dan
Berdaya Saing

Bab V Revolusi
Mental dan
Pembangunan
Kebudayaan

Arah Kebijakan

1

Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan

2

Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial

3

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta

4

Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas

5

Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda

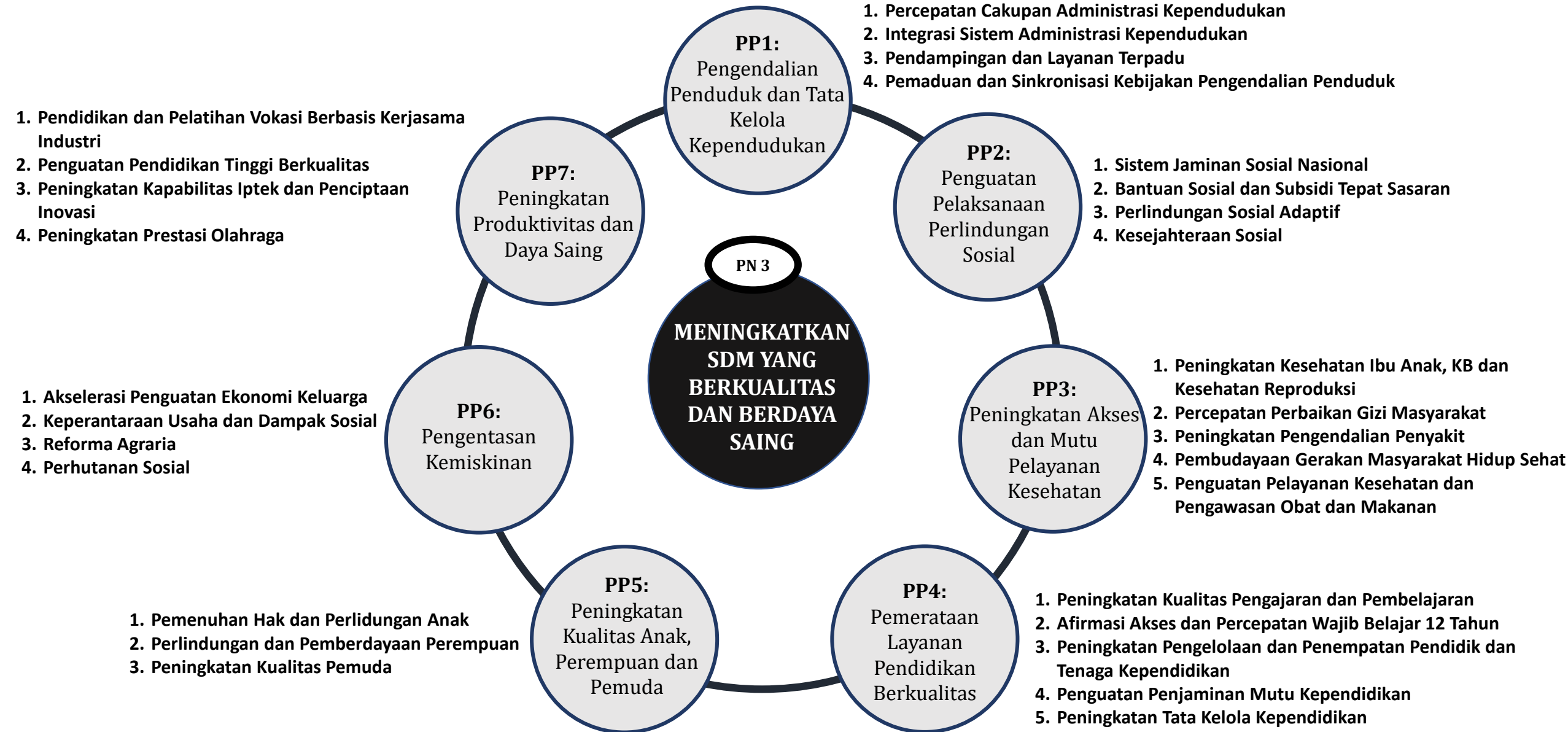
6

Mengentaskan kemiskinan

7

Meningkatkan produktivitas dan daya saing

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas PN III



Major Projects 2020-2024

Major Projects		Manfaat Proyek	K/L Pelaksana
1	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	• Meningkatkan daya saing SDM Indonesia • Mendukung indikator SDM di tingkat global • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Kemenkes; BKKBN; Kemdikbud; KPPPA; Kemsos; Kemenkominfo; Kemenag; dan Kementan
2	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	• Meningkatkan produktivitas naker • Meningkatkan keberkerjaan angkatan kerja • Meningkatkan keterampilan, keahlian dan daya saing tenaga kerja	Kemenko Ekon; Kemenko PMK; Kemendikbud; Kemenristekdikti; Kemenaker; Kemenperin; Kementan; Kemen ESDM; 11 KL lain
3	Pembangunan Science Technopark (optimalisasi Triple Helix di 4 major Universitas)	• Wahana komersialisasi hasil riset • Menjalankan skema <i>triple helix</i> dengan insentif fasilitas untuk industry masuk <i>science technopark</i>	Kemenristekdikti; ITB; UI; UGM dan IPB
4	Digitalisasi dan Integrasi bantuan Sosial	• Meningkatkan ketepatan dan efektivitas program sesuai Perpres tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai • Mendorong cakupan layanan keuangan formal terutama bagi masyarakat miskin • Mensukseskan Gerakan Nasional Non-Tunai mendukung industry 4.0	Kemensos; Kemendikbud; Kemenag; Kemenristekdikti; KemenESDM

TERIMA KASIH

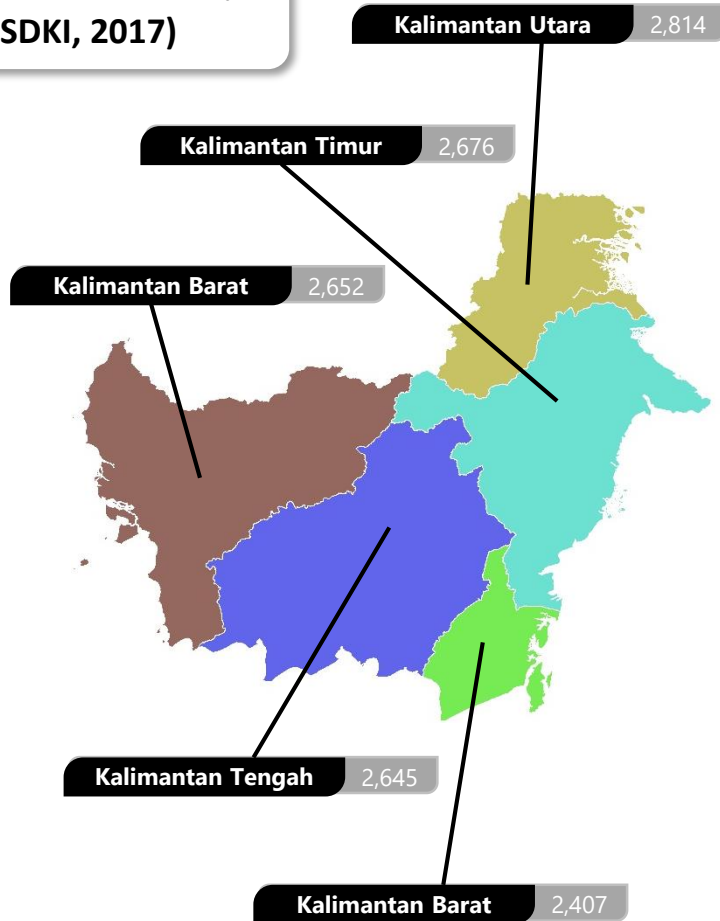
LAMPIRAN

- **Indikasi Lokasi**
- **Isu Strategis (Analisis Situasi)**
- **Arah Kebijakan, Strategi, Sasaran dan Indikator**
- **Program, Kegiatan dan Proyek Prioritas Nasional**
- **Penyelarasan SDGs**

LAMPIRAN INDIKASI LOKASI

Penanganan Isu Kependudukan Yang Tepat Menjadi Kunci Peningkatan SDM

TFR Nasional: 2,4
(SDKI, 2017)



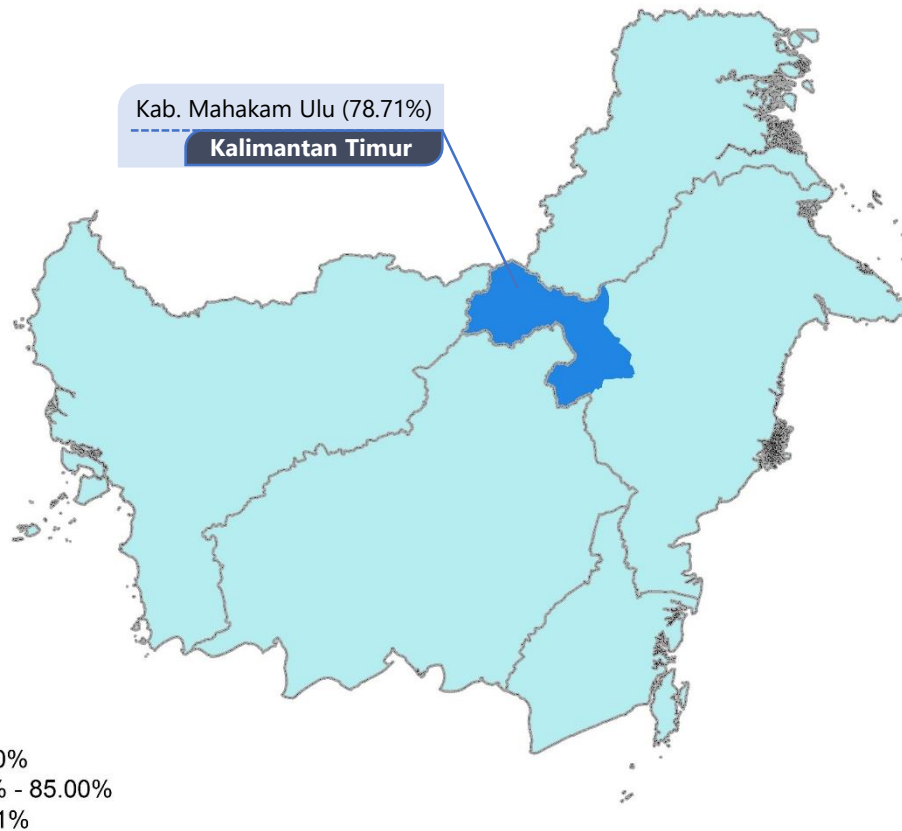
Semua provinsi di Kalimantan memiliki TFR di atas rata-rata nasional (TFR > 2,4), sehingga diperlukan strategi khusus yaitu:

- Pengembangan inovasi dalam Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) program kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan budaya, karakteristik, atau kondisi masyarakat lokal.
- Advokasi intensif kepada pembuat kebijakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan.
- Peningkatan akses dan layanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas terutama bagi keluarga miskin.

Pertumbuhan penduduk yang seimbang ditujukan untuk:

- Optimalisasi bonus demografi dengan meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan keahlian dan kesehatan serta upaya penurunan kematian bayi yang lebih cepat.

Target Prioritas Perluasan Cakupan NIK Kalimantan 2020-2024



Perluasan Kelompok Khusus

- Rujukan informasi tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Sosialisasi, advokasi, dan edukasi layanan
- Partisipasi aktif



Integrasi Sensus Penduduk 2020

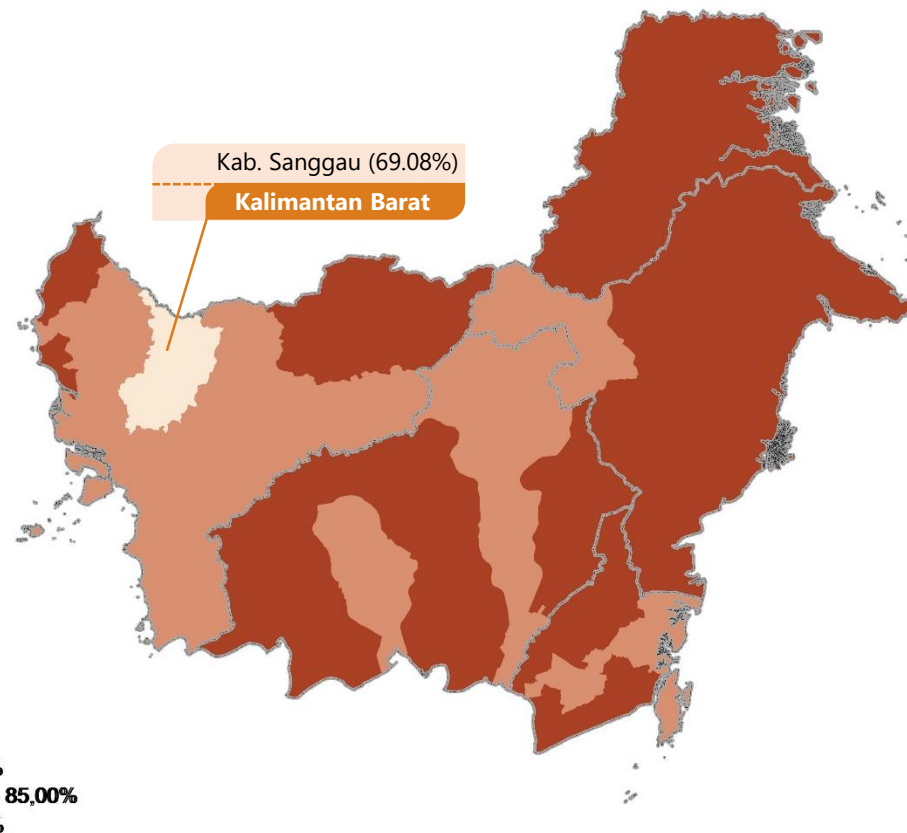
- Data kependudukan berbasis NIK tersedia untuk dimanfaatkan sebagai dasar pelaksanaan sensus penduduk
- Data sensus penduduk untuk pemutakhiran data kependudukan



Integrasi Data

- NIK digunakan sebagai identitas tunggal dalam layanan publik

Target Prioritas Perluasan Kepemilikan Akta Kelahiran Kalimantan 2020-2024

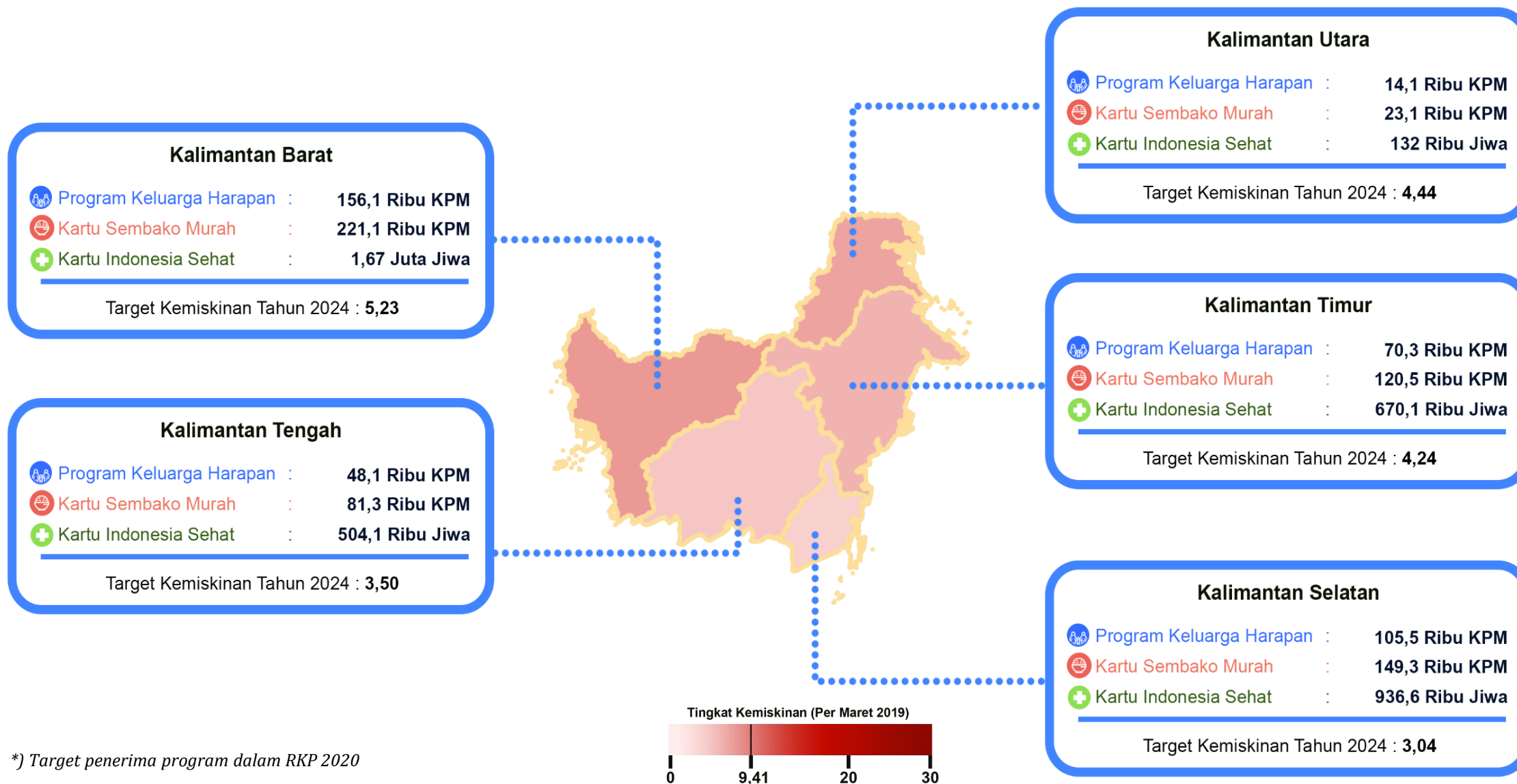


Perluasan Jangkauan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

- Penyelenggaraan layanan mudah, cepat, dan inovatif
- Penyederhanaan prosedur dan layanan terpadu
- Kebijakan tentang layanan terpadu
- Kebijakan layanan keliling terpadu
- Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat kecamatan dan desa

Rencana Sebaran Penerima Manfaat

Kegiatan Prioritas Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran Tahun 2020-2024 di Pulau Kalimantan *)

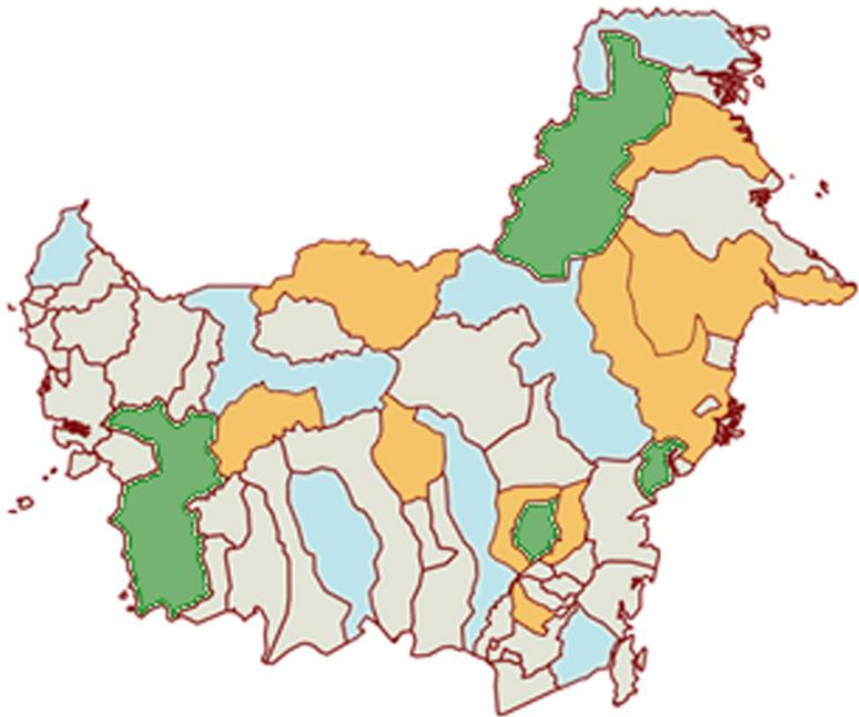


*) Target penerima program dalam RKP 2020

Lokasi Fokus Prioritas Penurunan *Stunting*

Cakupan intervensi:

- PMT ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dan balita kurus
- Pemantauan status gizi
- Akses air minum dan sanitasi
- Parenting dan PAUD
- Peningkatan kapasitas pemda



● 2018

● Tambahan di
2019

● Tambahan di
2020

KALIMANTAN BARAT

1. Ketapang
2. Sambas
3. Sintang
4. Melawi
5. Kapuas Hulu

KALIMANTAN TENGAH

1. Barito Timur
2. Kotawaringin Timur
3. Kapuas
4. Barito Selatan
5. Gunung Mas

KALIMANTAN UTARA

1. Malinau
2. Nunukan
3. Bulungan

KALIMANTAN SELATAN

1. Hulu Sungai Utara
2. Tanah Bumbu
3. Tapin
4. Tabalong

KALIMANTAN TIMUR

1. Penajam Paser Utara
2. Kutai Barat
3. Kutai Kartanegara
4. Kutai Timur

Pemetaan Kewilayahan – Pengendalian Penyakit Menular

Prioritas Wilayah Sumatera KESEHATAN

Eliminasi Malaria di **154 Kab/Kota**; Filariasis di **43 Kab/Kota**; Kusta di **5 Kab/Kota**

Prioritas Wilayah Kalimantan KESEHATAN

Eliminasi Malaria di **29 kab/Kota**; Filariasis di **30 Kab/Kota**; Kusta di **3 Kab/Kota**

Prioritas Wilayah Sulawesi KESEHATAN

Eliminasi Malaria di **81 Kab/Kota**; Filariasis di **16 Kab/Kota**; Kusta di **53 Kab/Kota**

Prioritas Wilayah Maluku KESEHATAN

Eliminasi malaria di **3 Kab/Kota**; Filariasis di **12 Kab/Kota**; Kusta di **19 Kab/Kota**

Prioritas Wilayah Jawa-Bali KESEHATAN

Eliminasi malaria di **128 Kab/Kota**; Filariasis di **9 Kab/Kota**; Kusta di **20 Kab/Kota**

Prioritas Wilayah Nusa Tenggara KESEHATAN

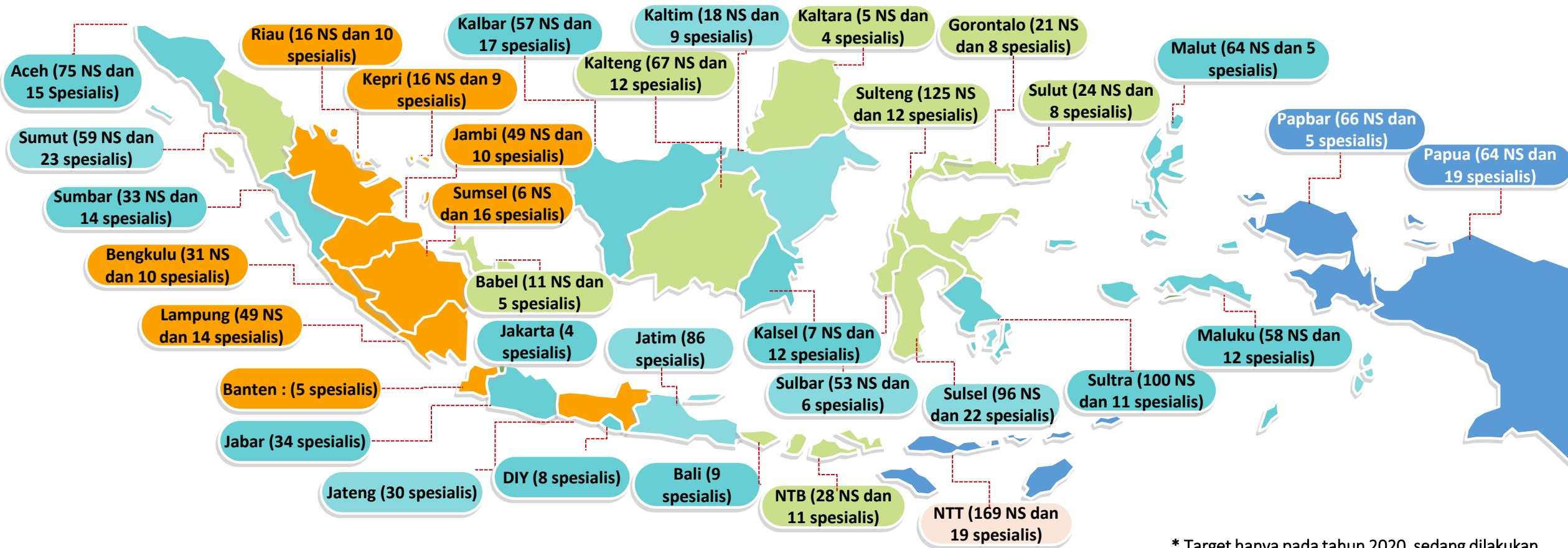
Eliminasi Malaria di **10 Kab/Kota**; Filariasis di **14 Kab/Kota**; Kusta di **8 Kab/Kota**

Prioritas Wilayah Papua KESEHATAN

Eliminasi malaria di **tingkat provinsi (Kab/Kota belum)**; Filariasis di **10 Kab/Kota**; Kusta di **24 Kab/Kota**



Pemetaan Kewilayahan - Penugasan Tenaga Kesehatan

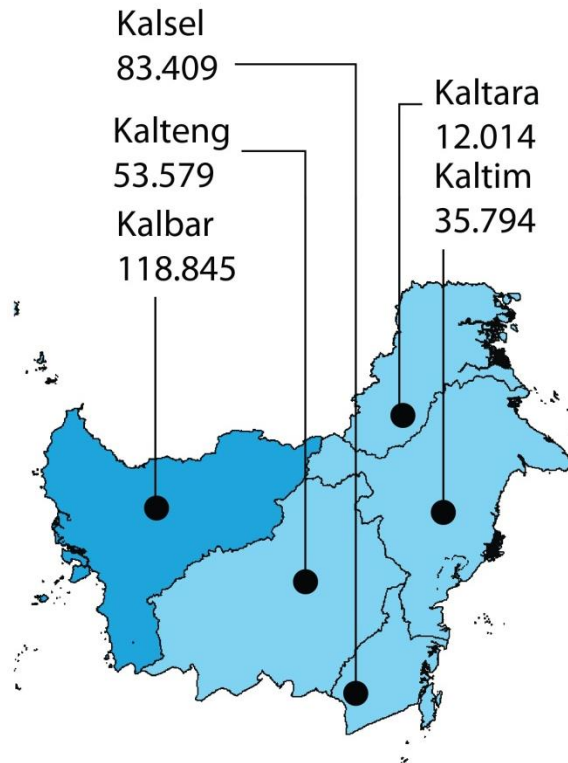


* Target hanya pada tahun 2020, sedang dilakukan penghitungan target hingga 2024

Penugasan melalui program :

- Nusantara Sehat (NS) di Puskesmas terdiri dari min. 5 jenis tenaga kesehatan
- Penugasan dokter spesialis di Rumah Sakit

Lokasi Fokus Prioritas Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kalimantan



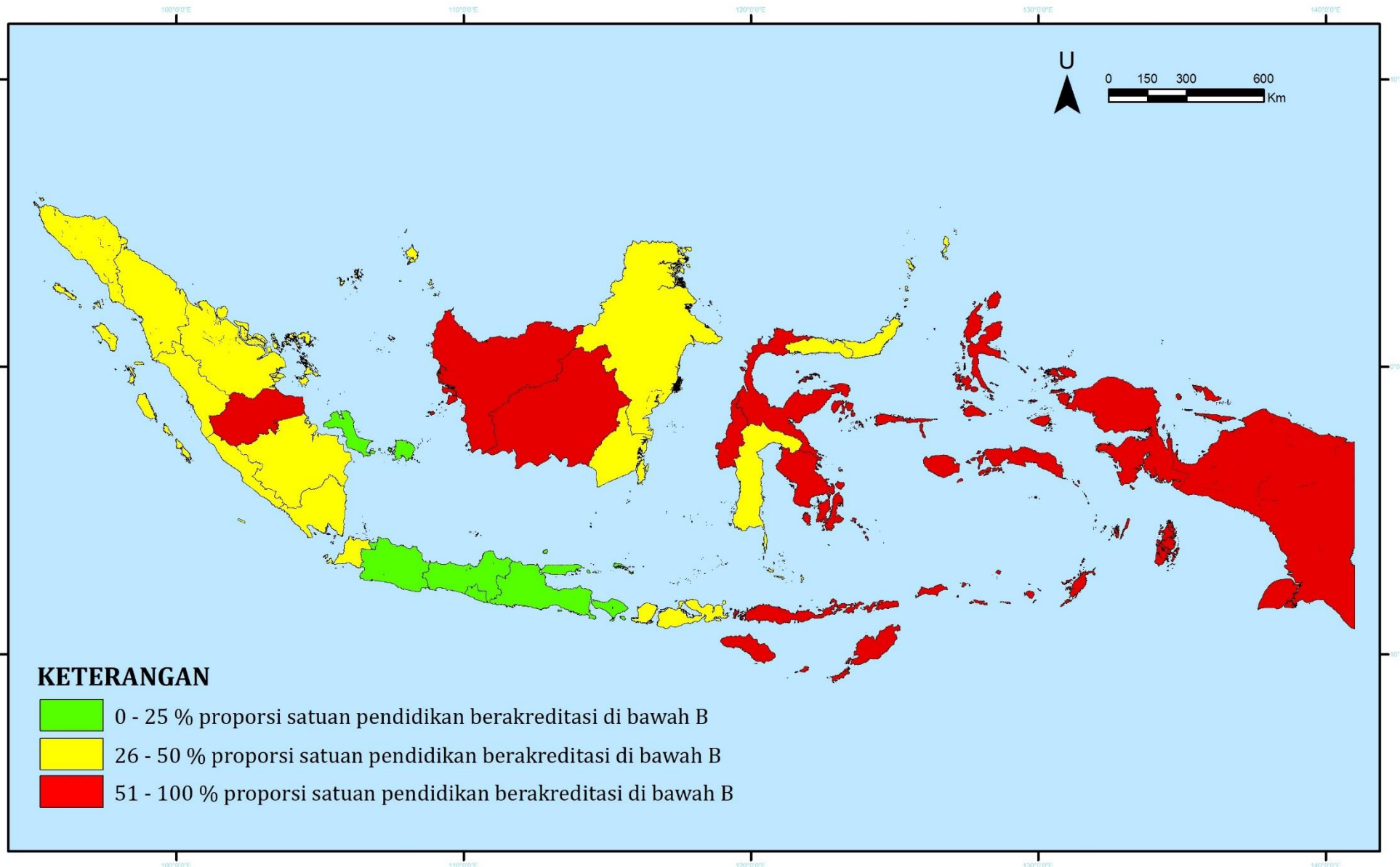
KETERANGAN



Prioritas wilayah penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) agar kembali bersekolah:

1. Provinsi Kalimantan Barat (118.845 Anak Tidak Sekolah)
2. Provinsi Kalimantan Tengah (53.579 Anak Tidak Sekolah)
3. Provinsi Kalimantan Selatan (83.409 Anak Tidak Sekolah)
4. Provinsi Kalimantan Timur (35.794 Anak Tidak Sekolah)
5. Provinsi Kalimantan Utara (12.014 Anak Tidak Sekolah)

Pemetaan Kewilayahan – Kualitas Pendidikan



Prioritas wilayah percepatan kualitas dan akreditasi pendidikan:

1. Pulau Papua
2. Kepulauan Maluku dan Maluku Utara
3. Provinsi NTT
4. Sebagian besar Pulau Sulawesi
5. Sebagian Pulau Kalimantan

Kalsel

Energi: 3
Industri: 21
Industri Kreatif: 5
Kemaritiman: 2
Ket. Pangan: 17
Pariwisata: 6

Kaltara

Energi: 1
Industri: 4
Kemaritiman: 2
Pariwisata: 1

Kalbar

Energi: 1
Industri: 14
Kemaritiman: 4
Ket. Pangan: 33
Pariwisata: 2

Kalteng

Energi: 6
Industri: 14
Kemaritiman: 3
Ket. Pangan: 47
Pariwisata: 4

Kaltim

Energi: 13
Industri: 33
Kemaritiman: 3
Ket. Pangan: 28
Pariwisata: 7

Dukungan SMK Terhadap Sektor Energi, Sektor Industri, Sektor Industri Kreatif, Sektor Kemaritiman, Sektor Ketahanan Pangan, dan Sektor Pariwisata:

1. Provinsi Kalimantan Barat

- 1 SMK mendukung sektor energi
- 14 SMK mendukung sektor industri
- 4 SMK mendukung sektor kemaritiman
- 33 SMK mendukung sektor ketahanan pangan
- 2 SMK mendukung sektor pariwisata

2. Provinsi Kalimantan Selatan

- 3 SMK mendukung sektor energi
- 21 SMK mendukung sektor industri
- 5 SMK mendukung sektor industri kreatif
- 2 SMK mendukung sektor kemaritiman
- 17 SMK mendukung sektor ketahanan pangan
- 6 SMK mendukung sektor pariwisata

3. Provinsi Kalimantan Tengah

- 6 SMK mendukung sektor energi
- 14 SMK mendukung sektor industri
- 3 SMK mendukung sektor kemaritiman
- 47 SMK mendukung sektor ketahanan pangan
- 4 SMK mendukung sektor pariwisata

4. Provinsi Kalimantan Utara

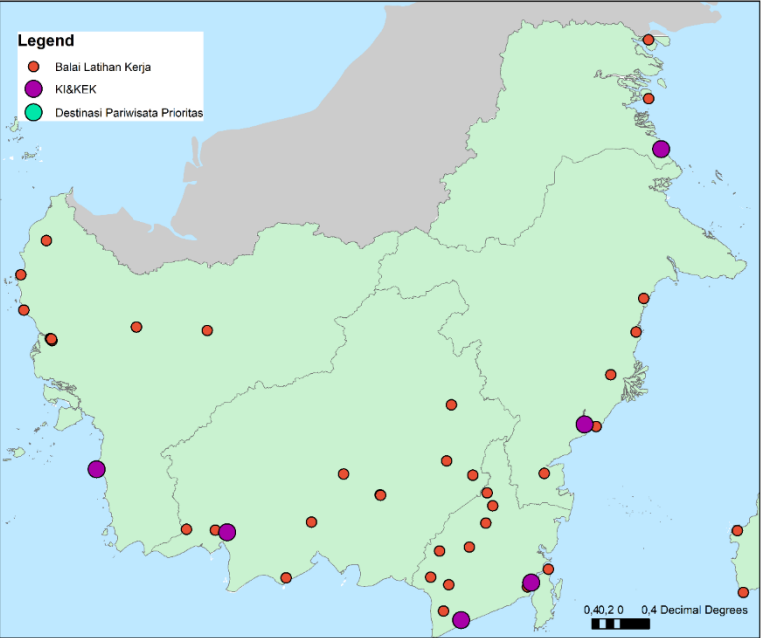
- 1 SMK mendukung sektor energi
- 4 SMK mendukung sektor industri
- 2 SMK mendukung sektor kemaritiman
- 1 SMK mendukung sektor pariwisata

5. Provinsi Kalimantan Timur

- 13 SMK mendukung sektor energi
- 33 SMK mendukung sektor industri
- 3 SMK mendukung sektor kemaritiman
- 28 SMK mendukung sektor ketahanan pangan
- 7 SMK mendukung sektor pariwisata

Pulau Kalimantan

Persebaran BLK, Destinasi Pariwisata Prioritas, dan Kawasan Industri Baru Pulau Kalimantan Tahun 2020-2024



Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja 2020-2024^{c)}

Industri	Jabatan	Jumlah
	Tenaga Presisi (Tekstil)	430.430
	Tenaga Pengolah Industri Pengolahan	123.664
	Tenaga Pengolah Industri Tekstil	52.979
Pertanian	Jabatan	Jumlah
	Buruh Pertanian	32018
	Petani Subsisten	12412
	Petani/Pekerja Kehutanan Subsisten	7663
Konstruksi	Jabatan	Jumlah
	Buruh Konstruksi Gedung	7.729
	Manajer Perusahaan (Gedung)	4.431
Pariwisata	Jabatan	Jumlah
	Buruh Konstruksi Sipil	2.847
	Manajer Umum (Perdagangan)	55.071
	Pelayan, Pramuwisata, Koki ^{d)}	23.700
	Manajer Umum ^{d)}	12.809

c) Kebutuhan **per tahun** terbesar berdasarkan jabatan di sektor ybs.
d) Subsektor penyediaan makanan dan minuman pariwisata.

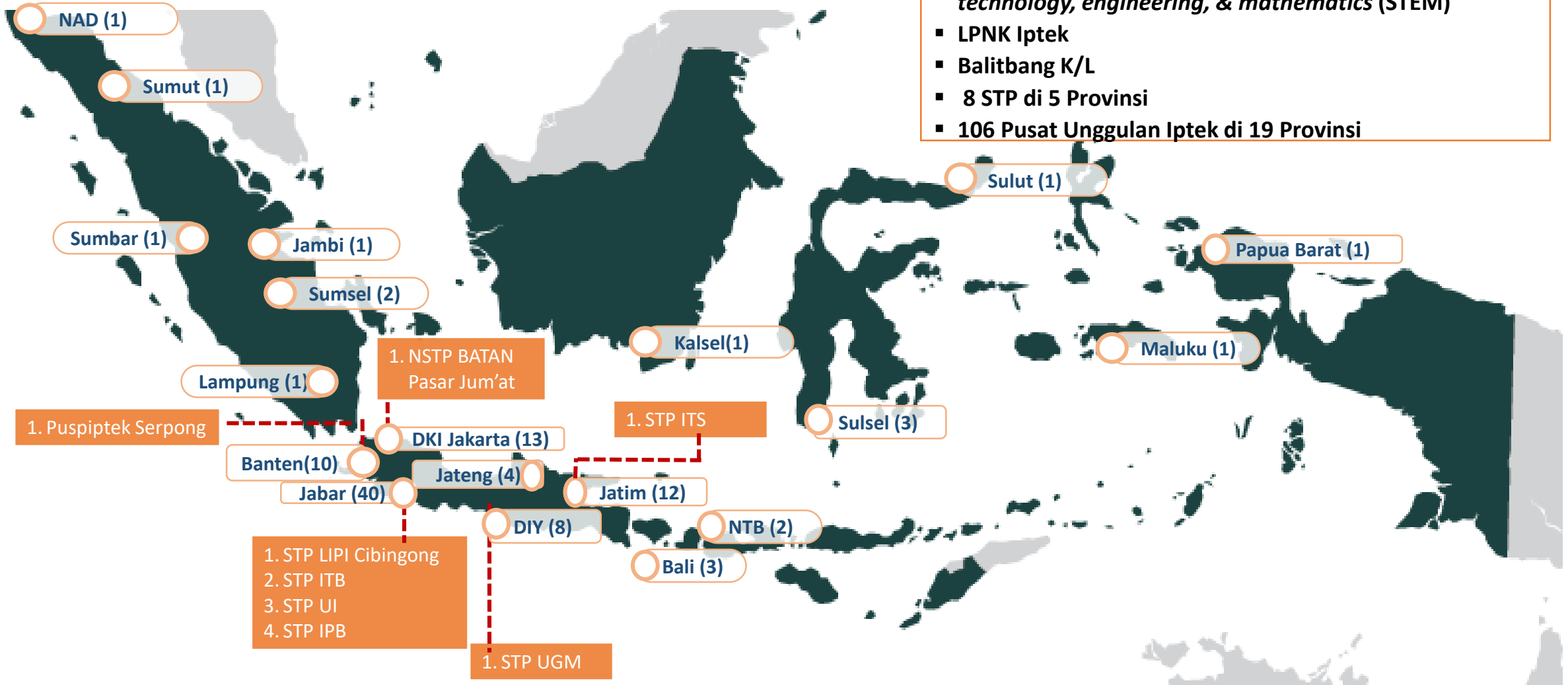
Jumlah dan Kejuruan

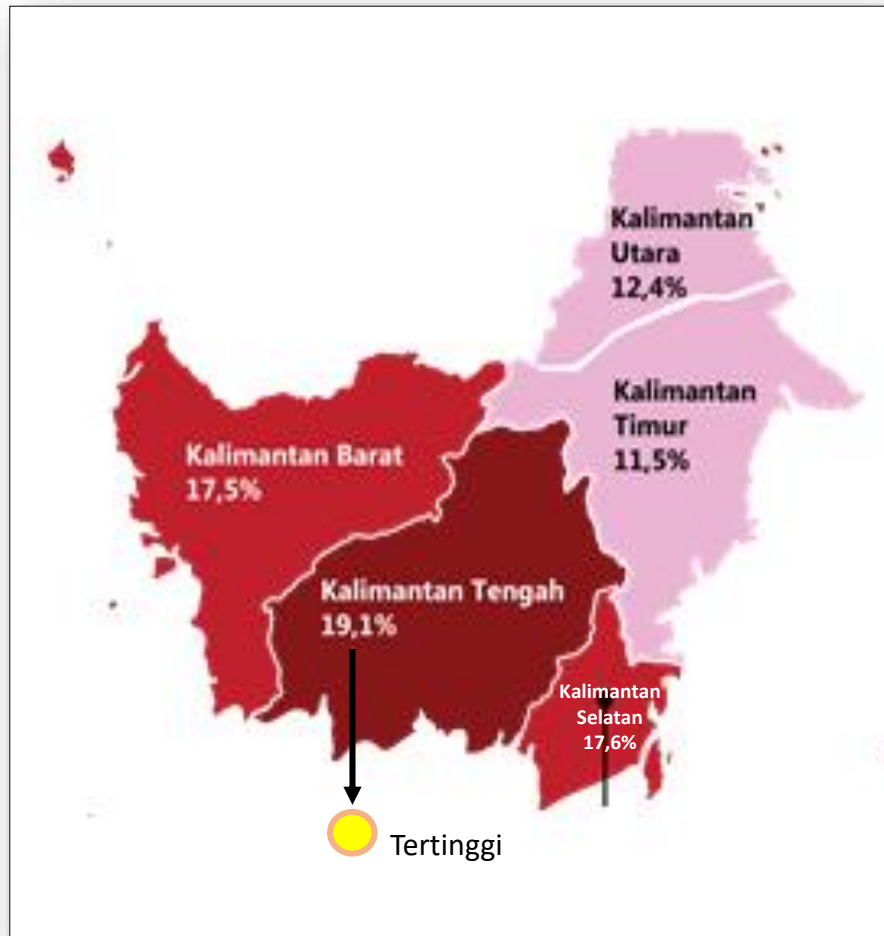
BLK	
Jumlah lembaga	36 (33 BLK yang beroperasi)
Kejuruan dengan kapasitas peserta terbanyak	Otomotif
	Komputer/IT
	Menjahit
	Las
	Bisnis dan Manajemen

Sumber : Ditjen Binalattas, Kemnaker (2018)

Pemetaan Kewilayahan – Pembangunan IPTEK

- Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan *science, technology, engineering, & mathematics* (STEM)
- LPNK Iptek
- Balitbang K/L
- 8 STP di 5 Provinsi
- 106 Pusat Unggulan Iptek di 19 Provinsi





STRATEGI PENANGANAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK :



PENINGKATAN LAYANAN KESEJAHTERAAN ANAK

- Optimalisasi PIK-R, layanan kesehatan reproduksi remaja yang dicakup dalam Pelayanan Kesehatan Ramah Remaja (PKPR) dan Bina Kesehatan Remaja (BKR)
- Layanan pendampingan bagi anak yang terlanjur menikah
- Pemberdayaan ekonomi keluarga
- Optimalisasi layanan dan konseling untuk orang tua (PUSPAGA)
- Penguatan bantuan Program Keluarga Harapan dan Kartu Indonesia Pintar



PENGUATAN KAPASITAS ANAK SEBAGAI AGEN PERUBAHAN

- Akses pendidikan berkualitas dan wajib 12 tahun
- Peningkatan pengetahuan terkait hak kesehatan reproduksi dan seksualitas
- Peningkatan pengetahuan terkait keterampilan hidup
- Peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan
- Optimalisasi Pusat Kreativitas Anak
- Penguatan Forum Anak



PENINGKATAN PENGETAHUAN & KESADARAN ORANGTUA, KELUARGA, MASYARAKAT (SEKOLAH, PESANTREN, DAN OMS)

- Diseminasi informasi terkait hak anak dan risiko perkawinan anak
- Kampanye pencegahan perkawinan anak melalui sekolah, mimbar keagamaan, lembaga adat dan media massa



PENGUATAN KERANGKA HUKUM DAN KELEMBAGAAN

- Penguatan kapasitas KUA dan peradilan agama
- Optimalisasi program bimbingan perkawinan (BIMWIN)
- Harmonisasi dan sinkronisasi UU Perlindungan Anak dan perkawinan
- Advokasi pemberian sanksi hukum terhadap orang tua dan para pihak yang melakukan perkawinan anak
- Advokasi untuk perda-perda pencegahan perkawinan anak



PENGUATAN KOORDINASI & SINERGI LINTAS K/L, OMS, DU, MP & MEDIA

- Dokumentasi praktik baik pencegahan perkawinan anak di setiap tingkatan
- Penguatan Rakornas, Rakorda, dan lintas K/L
- Pembangunan alat monitoring dan evaluasi untuk pencegahan perkawinan anak di berbagai tingkatan
- Pembentukan Kelompok Kerja Lintas K/L/OPD untuk memantau, mengevaluasi, dan bersinergi program pencegahan perkawinan anak

- Persentase Perempuan 20 - 24 Tahun Yang Menikah Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi, 2018
- Persentase perkawinan usia anak terendah di Pulau Kalimantan adalah **Provinsi Kalimantan Timur** sebesar **11,5 persen**
- Persentase perkawinan usia anak tertinggi di Pulau Kalimantan adalah **Provinsi Kalimantan Tengah** sebesar **19,1 persen**.

LAMPIRAN ISU STRATEGIS (ANALISIS SITUASI)

Prioritas Nasional III : Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing

1



Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan

- Usia produktif terbesar namun belum kompetitif
- Mobilitas penduduk tidak merata, 56% tinggal di pulau Jawa
- Pencatatan perpindahan penduduk belum real time.
- Data kependudukan belum valid sebagai dasar penyusunan kebijakan
- Pelayanan kependudukan yang berkualitas belum merata

2



Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk

- Cakupan peserta JKN masih <80% (belum mencapai UHC)
- Penambahan peserta SJSN dari pekerja informal dan bukan penerima upah melambat.
- Jumlah peserta tidak aktif masih tinggi.
- Kelembagaan SJSN belum optimal.
- Perlindungan sosial yang belum responsif terhadap bencana dan pola adaptif belum berkembang

3



Pemenuhan Layanan Dasar

- Kematian ibu dan stunting masih tinggi dibandingkan target SDGs
- Faktor risiko penyakit tidak menular meningkat dan penyakit menular masih tinggi
- Kualitas pelayanan kesehatan belum merata
- Terdapat 4,4 juta anak usia 7-18 tahun tidak sekolah (ATS)
- Partisipasi pendidikan tinggi hanya 29,93%
- Pengajaran dan Pembelajaran berkualitas belum merata

Prioritas Nasional III : Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing

4



Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda

- 16% anak belum memiliki akte kelahiran
- 12,1% perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun
- 9,1% penduduk usia <18 tahun merokok dan 1,9% anak <15 tahun menggunakan narkoba
- Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan)
- Ketimpangan gender tinggi ditunjukkan dengan partisipasi kerja masih didominasi laki-laki
- Partisipasi pemuda dalam pembangunan belum optimal

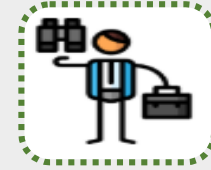
5



Pengentasan Kemiskinan

- Laju kemiskinan cenderung melambat
- Sektor yang menjadi andalan masyarakat miskin (pertanian, dagang) tumbuh lebih rendah dibandingkan sektor lain
- Baru 25,6% RT miskin memiliki akses layanan keuangan
- Kelompok miskin dan rentan sulit bersaing dalam usaha produktif

6



Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

- Kapabilitas lptek dan inovasi masih rendah, ditandai capaian Global Innovation Index yang berada di peringkat 85 dari 126 negara
- Kualitas layanan pendidikan belum optimal dan keterlibatan industri yang rendah menyebabkan mismatch antara penyedia diklat vokasi dengan kebutuhan pasar kerja
- Produktivitas penelitian diukur melalui publikasi di jurnal internasional meningkat namun terjadi penurunan sitasi yang mencapai 45% per tahun
- Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah, peringkat 65 dari 130 negara (*Global Human Capital Index*, WEF 2017)
- Pekerja masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didominasi oleh lulusan SMK
- Prestasi olimpiade baru pada 3 cabang olahraga

LAMPIRAN

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

SASARAN DAN INDIKATOR

Strategi

Percepatan cakupan administrasi kependudukan

Integrasi sistem administrasi kependudukan

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk

Indikator dan Target

Indikator		Baseline	Target 2024
	Total Fertility Rate	2,28	2,1
	Cakupan NIK	96	100
	Kepemilikan akte kelahiran	83,3	100
	Pencatatan akte kematian	NA	100
	Kepemilikan buku nikah	NA	100
	Pencatatan perceraian	NA	100
	Penyebab kematian	Belum Diterapkan	100
	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	25	80
	Jumlah kab/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monev unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	86	300

Sasaran dan Strategi Arah Kebijakan 2

Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial (1)

Strategi

**Penguatan Pelaksanaan
Jaminan Sosial**

**Penguatan Pelaksanaan
Penyaluran Bantuan Sosial dan
Subsidi Tepat Sasaran**

Perlindungan sosial adaptif

**Peningkatan Kesejahteraan
Sosial**

Indikator dan Target

Indikator	Baseline	Target 2024
 Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial: a. Proporsi seluruh penduduk b. Proporsi Penduduk 40 persen terbawah	78,7 % 65,2 %	98% 80%
 Cakupan penerima bantuan non-tunai dan subsidi tepat sasaran: a. Bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan b. Bantuan Pangan c. Bantuan elpiji 3 kg d. Bantuan listrik daya 450 dan 900 VA	10 juta KK 15,6 juta KK 31,4 juta KPM 31,4 juta KPM	10 juta KK 15,6 juta KK 31,4 juta KPM 31,4 juta KPM
 Cakupan PBI JKN dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah	96 juta penduduk	112,9 juta penduduk
 Mobilitas penduduk lanjut usia (%)	92,1	94
 Kapasitas penduduk lansia (%)	88,6	90
 Pembangunan kawasan ramah lansia (kab/kota/komunitas)	-	meningkat

Sasaran dan Strategi Arah Kebijakan 2

Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial (2)

Indikator dan Target

Indikator	Baseline	Target 2024	Indikator	Baseline	Target 2024
 Persentase rumah tangga dengan lansia yang memperoleh bantuan sosial	18,90	25	 Tersusunnya Sistem Perlindungan Sosial Adaptif	0	1
 Cakupan kepesertaan JKN (persen)	81,4	98	 Persentase anak penyandang disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar	37,5	50
 Cakupan kepesertaan BPJS TK			 Persentase pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kota inklusif	2,7%	7,5%
1. Pekerja formal 40%	40%	>30%			
2. Pekerja informal 5%	5%	>30%			
 Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	xxx	20 juta pekerja			

Strategi

Peningkatan KIA, KB dan Kespro

Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat

Peningkatan Pengendalian Penyakit

Pembudayaan Germas

Penguatan Sistem Kesehatan dan POM

Indikator dan Target

Indikator		Baseline	Target 2024
	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	305	183
	Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	24	16
	Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Cara Modern	57,2	63,41
	Unmet Need KB (%)	10,60	7,4
	ASFR 15 – 19 Tahun	36	18
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	30,8	19
	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,2	7
	Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24	0,18

Indikator dan Target

Indikator	Baseline	Target 2024	Indikator	Baseline	Target 2024
 Insidensi TB (per 100.000 penduduk)	319	190	 Persentase rumah sakit terakreditasi	63	95
 Eliminasi malaria (kab/kota)	285	405	 % puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	23	83
 Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	9,1	8,7	 Persentase puskesmas tanpa dokter	15	0
 Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun (%)	21,8	21,8	 Persentase puskesmas dengan obat esensial	86	96
 Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	57,9	80	 Persentase obat memenuhi syarat	80,9	92,3
 Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	40	85	 Persentase makanan memenuhi syarat	71	90

Sasaran dan Strategi Arah Kebijakan 4

Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas (1)

Strategi

Peningkatan Kualitas Pengajaran dan pembelajaran

Peningkatan Pemerataan Akses Layanan Pendidikan dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun

Peningkatan Profesionalisme, Kualitas, Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Penguatan Penjaminan Mutu pendidikan

Peningkatan Tata Kelola Pembangunan Pendidikan

Indikator dan Target

Indikator	Baseline	Target 2024
 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8,45	9,16
 Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,85	14,16
 Nilai rata-rata hasil PISA: 1. Membaca 2. Matematika 3. Sains	397 386 403	412,6 396,8 418,0
 Angka Partisipasi Kasar (Persen) 1. PAUD 2. SD/MI/ sederajat 3. SMP/MTs/ sederajat 4. SMA/SMK/MA/sederajat 5. Pendidikan Tinggi (PT)	34,36 108,50 90,23 82,84 29,93	53,10 106,71 95,43 84,02 43,86

Sasaran dan Strategi Arah Kebijakan 4

Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas (2)

Indikator dan Target

Indikator	Baseline	Target 2024	Indikator	Baseline	Target 2024
 Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (TK/RA/BA/PAUD)	74,80	77,78	 Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test AKSI (Persen):		
 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20% termiskin dan 20% terkaya			1. Membaca	53,2	61,2
1. SMA/SMK/MA/Sederajat 2. Pendidikan Tinggi	0,70 0,16	0,85 0,50	2. Matematika	22,9	30,1
 Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen):			3. Sains	26,4	34,4
1. Membaca 2. Matematika 3. Sains	44,62 31,40 44,05	49,80 39,83 48,00	 Persentase Satuan Pendidikan Berakreditasi Minimal B (Persen)		
 Persentase Guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB) yang Bersertifikat Pendidik (%)	74,80	77,78	1. SD/MI	76,84	84,46
			2. SMP/MTS	70,13	81,33
			3. SMA/MA	71,01	80,86
			 Jumlah Perguruan Tinggi Terakreditasi A	91	235

Sasaran dan Strategi Arah Kebijakan 5

Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda

Strategi

Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui Penguatan Sistem Perlindungan Anak

Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan termasuk Pekerja Migran

Peningkatan Kualitas pemuda

Indikator dan Target

Indikator	Baseline	Target 2024
 Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA)	67,9	81,46
 Indeks Pembangunan Pemuda	51,50	57,67
 Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	9,40	Menurun
 Proporsi perempuan umur 20 – 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	12,1	8,74

Sasaran dan Strategi Arah Kebijakan 6

Pengentasan Kemiskinan

Strategi

Akselerasi Penguatan Ekonomi
Keluarga

Keperantaraan Usaha dan Dampak
Sosial

Reforma Agraria

Perhutanan Sosial

Indikator dan Target

Indikator		Baseline	Target 2024
	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	25,6	50
	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27,9	40
	Pembaruan kawasan hutan untuk masyarakat pedesaan dan desa	2 juta ha	10 juta ha

Sasaran dan Strategi Arah Kebijakan 7

Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (1)

Strategi

**Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
berbasis Kerjasama Industri**

**Penguatan Pendidikan Tinggi
Berkualitas**

**Peningkatan Kapabilitas Iptek dan
Penciptaan Inovasi**

**Pengembangan Budaya dan
Peningkatan Prestasi Olahraga**

Indikator dan Target

Indikator	Baseline	Target 2024
 Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	42,54	52,1
 Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (persen)	39,57	50
 Jumlah lulusan pelatihan vokasi	915.671	2,8 juta
 Lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi (orang)	472.089	2 juta
 Persentase Prodi per bidang ilmu yang dikembangkan di PT		
1. Sains keteknikan	40,9%	50%
2. Sosial humaniora	59,1%	50%
 Persentase lulusan PT menurut program studi		
1. Sains keteknikan	39,9%	45%
2. Sosial humaniora	60,1%	55%

Sasaran dan Strategi Arah Kebijakan 7

Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (2)

Indikator dan Target

Indikator	Baseline	Target 2024
 Persentase lulusan PT yang langsung bekerja	63	80
 Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal internasional	16.147	36.500
 Jumlah Prototipe dari Perguruan Tinggi	94	243
 Jumlah HKI yang didaftarkan dari hasil litbang Perguruan Tinggi	762	1.849
 Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina	143	600
 Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha	52	210
 Jumlah PT yang Masuk ke dalam WCU		
1. Top 100	-	1 (UI)
2. Top 300	1 (UI)	2 (ITB UGM)
3. Top 500	2 (ITB dan UGM)	3 (IPB, Unair, Unpad)

Indikator	Baseline	Target 2024
 Jumlah paten yang diberikan dan yang didaftarkan (resident)	790/1.362	1.000/3.000
 Persentase SDM Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) Berkualifikasi S3	14,08	20*
 Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan	81	138*
 Jumlah pranata litbang yang terakreditasi (aktif)	48	75*
 Jumlah publikasi internasional yang dapat disitasi	72.146	150.000
 Infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan	6	10
 STP yang ada yang dikembangkan:		
1. Berbasis Perguruan Tinggi	17	5
2. Berbasis Non Perguruan Tinggi	28	3

Sasaran dan Strategi Arah Kebijakan 7

Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (3)

Indikator dan Target

Indikator	Baseline	Target 2024	Indikator	Baseline	Target 2024
 Hasil inovasi Prioritas Riset Nasional	n/a	40*	 Proporsi anggaran litbang terhadap PDB	0,25	0,42
Penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan:  - Penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam - Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	12	24	Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga:  - Persentase penduduk berumur >10 thn olahraga selama seminggu terakhir - Peringkat Asian Games - Peringkat Asian Para Games - Jumlah perolehan medali pada Olympic Games - Jumlah perolehan medali pada Paralympic Games	31,38	40
	35	35		Peringkat ke-4	Peringkat ke-5
				Peringkat ke-5	Peringkat ke-5 sampai 6
				1 medali emas	3 medali emas
				-	3 medali emas

LAMPIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN PROYEK PRIORITAS NASIONAL

PROYEK PRIORITAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN

KP : Pendampingan dan Layanan Terpadu

Strategi Pelaksanaan :

1. Perluasan jangkauan layanan dasar terpadu bagi penduduk
2. Percepatan pencapaian SPM di daerah
3. Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi terpadu
4. Penguatan verifikasi-validasi data penduduk miskin dan rentan
5. Perluasan sertifikasi pendamping dan akreditasi lembaga kesos
6. Peningkatan kapasitas dan pelatihan pendamping masyarakat

KP : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk

Strategi Pelaksanaan :

1. Sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengendalian penduduk
2. Administrasi mobilitas penduduk



KP : Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan

Strategi Pelaksanaan :

1. Perluasan jangkauan layanan administrasi kependudukan
2. Peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat terhadap administrasi kependudukan
3. Percepatan kepemilikan dokumen pendataan penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus

KP : Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan

Strategi Pelaksanaan :

1. Penguatan integrasi data administrasi kependudukan.
2. Penguatan infrastruktur administrasi kependudukan.
3. Data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap dan tepat waktu.

PROYEK PRIORITAS PENGUATAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL

KP : Perlindungan Sosial Adaptif

Strategi Pelaksanaan :

1. Integrasi perlindungan sosial dengan ketahanan ekonomi dan sosial terhadap perubahan iklim dan bencana
2. Penguatan kelembagaan perlindungan sosial adaptif
3. Pengembangan sistem pembiayaan perlindungan sosial untuk mengatasi resiko perubahan iklim dan bencana alam.



KP : Sistem Jaminan Sosial Nasional

Strategi Pelaksanaan :

1. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan Jaminan Sosial
2. Pengembangan Program Jaminan Sosial
3. Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional
4. Penguatan Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional

KP : Kesejahteraan Sosial

Strategi Pelaksanaan :

1. Perlindungan terhadap hak lanjut usia dan penyandang disabilitas
2. Implementasi rencana induk penyandang disabilitas
3. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelanjutusiaan (lansia aktif dan produktif)
4. Pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang berbasis komunitas yang terintegrasi (*Long Term Care*)
5. Penguatan pelayanan sosial kelompok rentan (masyarakat adat, HIV, dsb)

KP : Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran

Strategi Pelaksanaan:

1. Peningkatan efektivitas penyaluran bantuan sosial dan subsidi non-tunai dan terintegrasi, a.l. melalui Kartu Sembako Murah (KSM).
2. Penguatan inklusi keuangan melalui literasi penerima manfaat.
3. Peningkatan insentif untuk mendorong partisipasi sekolah bagi keluarga penerima bantuan sosial pendidikan dan kesehatan.
4. Peningkatan peran Pemda dalam pendampingan dan penyaluran bantuan

PROYEK PRIORITAS PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

KP : Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan

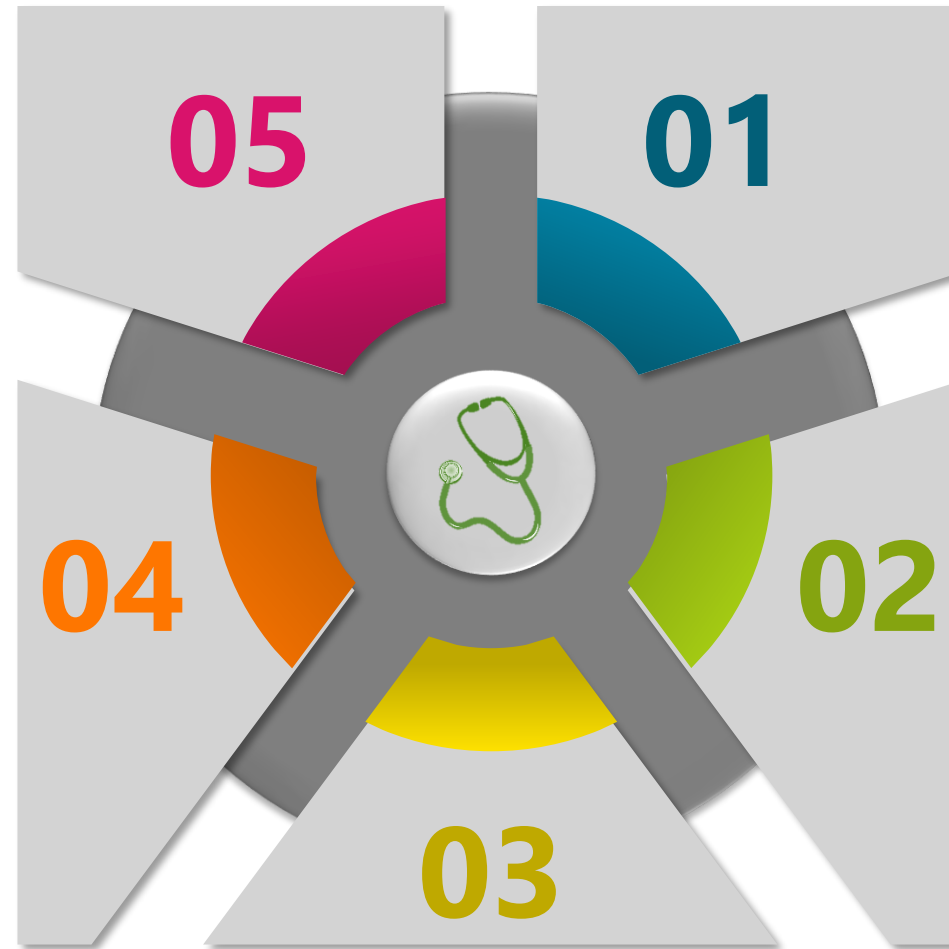
Proyek Prioritas :

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
2. Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan
3. Pemenuhan dan Peningkatan Daya Saing Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
4. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan
5. Penguatan Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan

KP : Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Proyek Prioritas :

1. Pengembangan Lingkungan Sehat
2. Penguatan Promosi Germas



KP : Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi

Proyek Prioritas :

1. Penurunan Kematian Ibu dan Bayi
2. Peningkatan Kesehatan Reproduksi

KP : Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat

Proyek Prioritas :

1. Penurunan *Stunting*

KP : Penguatan Pengendalian Penyakit

Proyek Prioritas :

1. Pengendalian Penyakit Menular
2. Pengendalian Penyakit Tidak Menular

PROYEK PRIORITAS PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS

KP : Peningkatan Tata Kelola Pendidikan

Proyek Prioritas :

1. Penguatan Tata Kelola Pemenuhan SPM Pendidikan
2. Penguatan Strategi Pembiayaan dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pendidikan
3. Peningkatan Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan

KP : Penjaminan Mutu Pendidikan

Proyek Prioritas :

1. Penguatan Kapasitas dan Akselerasi Akreditasi
2. Perluasan Budaya Mutu Pendidikan

KP : Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Proyek Prioritas :

1. Revitalisasi LPTK
2. Pendidikan Profesi Guru dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik
3. Pemenuhan dan Distribusi Tenaga Pendidik Berbasis Kebutuhan



KP : Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Proyek Prioritas :

1. Penerapan Kurikulum dan Pola Pembelajaran Inovatif
2. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik
3. Penguatan Kualitas Penilaian Pendidikan
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Pengintegrasian *Softskill* dalam Pembelajaran

KP : Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun

Proyek Prioritas :

1. Sarana dan Prasarana Pendidikan
2. Bantuan Pendidikan bagi Anak Kurang Mampu, dari Daerah Afirmasi dan Berbakat
3. Penanganan Anak Tidak Sekolah
4. Penguatan Pelayanan 1 Tahun PraSekolah

PROYEK PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KP : Reforma Agraria

Strategi Pelaksanaan:

- a) Penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), termasuk melalui pelepasan kawasan hutan
- b) Redistribusi dan Legalisasi tanah
- c) Pelaksanaan redistribusi tanah
- d) Pemberian sertifikat tanah (legalisasi)
- e) Pemberdayaan masyarakat penerima TORA

KP : Perhutanan Sosial

Strategi Pelaksanaan:

- a) Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan
- b) Pengembangan usaha perhutanan sosial
- c) Peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan dalam usaha Perhutanan Sosial



KP : Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga

Strategi Pelaksanaan:

- a) Pembinaan keuangan dan investasi keluarga
- b) Pendampingan usaha ekonomi produktif
- c) Pelatihan dan pemasaran usaha

KP : Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial

Strategi Pelaksanaan:

- a) Penguatan Forum Tanggung jawab Sosial Perusahaan
- b) Fasilitasi keperantaraan usaha produktif
- c) Pengembangan pendanaan inisiatif pemberdayaan berdampak sosial

PROYEK PRIORITAS KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA

KP : Peningkatan Kualitas Pemuda

Proyek Prioritas :

1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan
2. Pencegahan Perilaku Berisiko
3. Partisipasi Aktif Sosial dan Politik



KP : Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Proyek Prioritas :

1. Penjaminan Pemenuhan Hak Anak Secara Universal
2. Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya termasuk perkawinan anak.

KP : Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Proyek Prioritas :

Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender termasuk TPPO

PROYEK PRIORITAS PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING

KP : Peningkatan Prestasi Olahraga

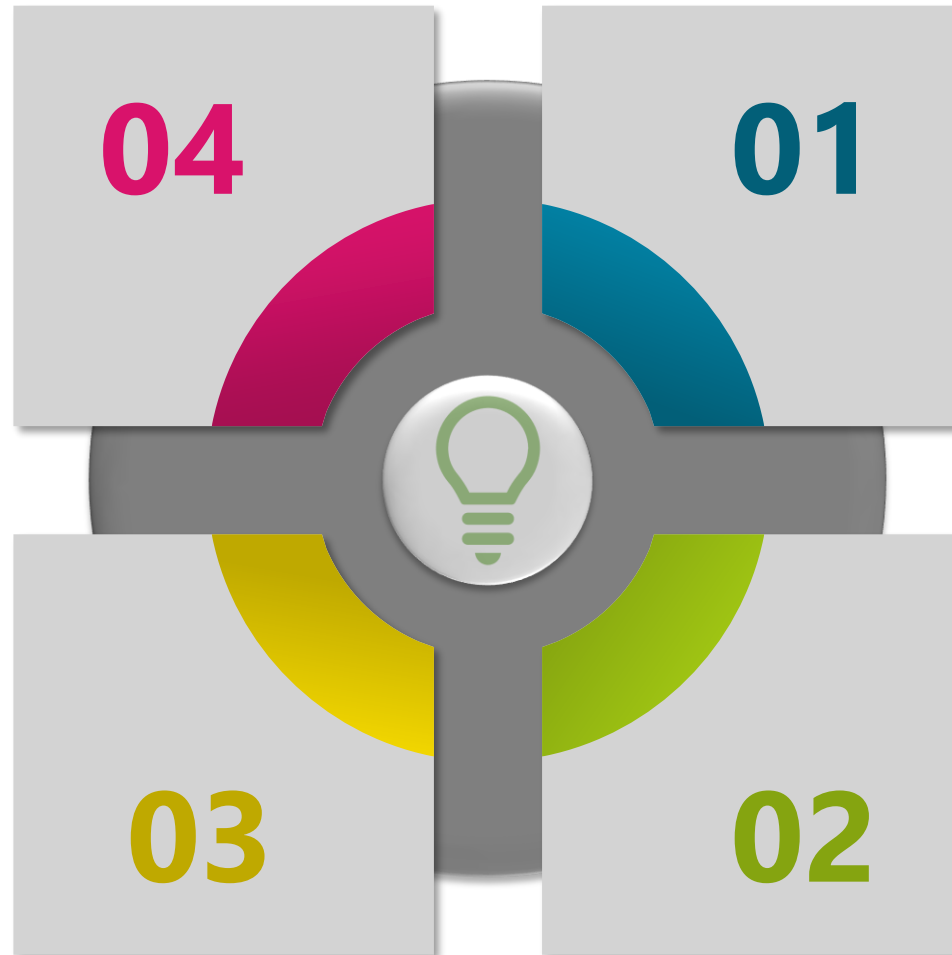
Proyek Prioritas :

1. Pengembangan budaya olahraga
2. Penataan sistem pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade
3. Penataan kelembagaan olahraga
4. Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional
5. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional
6. Pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan

KP : Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi

Proyek Prioritas :

1. Penciptaan Ekosistem Inovasi
2. Perintisan *Research Power-House*
3. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Belanja Litbang
4. Iptek dan Inovasi untuk Pembangunan Berkelanjutan



KP : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri

Proyek Prioritas :

1. Penyelarasan Prodi/Bidang Keahlian dan Pembelajaran Inovatif
2. Peningkatan Pendidik Vokasi Berkualitas
3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berkualitas
4. Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi

KP : Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas

Proyek Prioritas :

1. Perguruan Tinggi sebagai Produsen Iptek Inovasi dan Pusat Keunggulan
2. Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Penelitian
3. Peningkatan Kualitas Lulusan PT

LAMPIRAN PENYELARASAN SDGS

KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Goal	Jumlah Indikator			Keterangan	Justifikasi
	SDGs	RPJMN	Belum Tercantum dalam RPJMN		
Goal 1	4	4	-	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	Tingkat Kemiskinan secara nasional telah menjadi indikator pembangunan yang <i>in-line</i> dengan target SDGs hingga 2030.
				Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Indikator SDGs ini telah sejalan dengan visi misi & janji Presiden, yaitu melanjutkan PKH, yang tertuang dalam proyek prioritas nasional di matriks pembangunan RT RPJMN 2020-2024. Indikator ini juga mendorong beberapa indikator lain dalam SDGs yang tidak spesifik disebutkan dalam matriks RT RPJMN, antara lain indikator “persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasar dan inklusivitasnya”.
				Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Indikator SDGS ini sesuai dengan visi misi dan janji Presiden dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Hal ini juga sejalan dengan arah strategi dalam narasi RT RPJMN untuk mengembangkan perlindungan sosial yang adaptif.
				Pemulihan dan reintegrasi korban bencana sosial	

KESEHATAN

Indikator SDGs Tercantum dalam RPJMN (Narasi/Matrik)

1. Stunting Balita
2. Wasting Balita



Di PN lain

1. Konsumsi Alkohol
2. Rehabilitasi NAPZA
3. Cakupan intervensi pengobatan bagi gangguan penyalahgunaan zat terlarang



1. AKI
2. AKN
3. TFR
4. ASFR 15-19th
5. Kontrasepsi modern (mCPR)

5. Insiden Tuberkulosis
6. Insiden HIV (angka infeksi baru HIV)
7. Unmet need pelayanan kesehatan
8. Prevalensi Obesitas
9. Prevalensi tekanan darah tinggi
10. Insiden Hepatitis B

Indikator SDGs yang Dimodifikasi dengan Indikator yang lebih Sensitif

1. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	➤	• Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan
2. Angka kematian balita (per 1.000 kelahiran hidup)	➤	• Angka Kematian Bayi
3. Kejadian Malaria per 1000 orang	➤	• Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
4. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	➤	• Persentase puskesmas tanpa dokter • Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar
5. Proporsi fasilitas kesehatan yang memiliki paket inti obat esensial secara berkelanjutan	➤	• Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial
6. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	➤	• Jumlah kab/kota dengan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan • Jumlah kab/kota yang dilakukan survey eliminasi kusta
7. Proporsi populasi target yang tercakup semua vaksin pada program nasional	➤	• Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan
7. Merokok usia >15 tahun		

PENDIDIKAN TINGGI

PENYELARASAN DENGAN SDGs (PENDIDIKAN TINGGI & IPTEK)

Goal	Jumlah Indikator			Keterangan	Justifikasi
	SDGs	RPJMN	Belum Tercantum dalam RPJMN		
Goal 4	3	3	-	Jumlah bantuan resmi Pemri kepada Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang	Masuk dalam matriks PN 7 terkait politik luar negeri → Mahasiswa penerima beasiswa kemitraan negara berkembang
Goal 9	2	1	1	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk (Indikator 9.5.2) belum dimasukkan ke dalam RPJMN.	Belum ada mekanisme pendataan jumlah peneliti di luar pemerintah (swasta/industri). Sebagai gantinya, untuk mengukur kualitas SDM Iptek dicantumkan indikator persentase SDM Iptek (dosen, peneliti, dan perekayasa) yang memiliki kualifikasi S3.

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PENYELARASAN DENGAN SDGs TUJUAN 4 (PENDIDIKAN)

Jumlah Indikator		
SDGs (Meta Data)	RPJMN	Belum Tercantum dalam RPJMN
18	18	-

2 indikator SDGs yang perlu dikembangkan dan belum tersedia datanya:

1. Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.
2. Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.

Indikator global yang sedang dikembangkan terkait literasi dan numerasi orang dewasa

1. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.
2. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.

Disepakati tidak dihitung dalam *mainstreaming* SDGs

PENYELARASAN DENGAN SDGs TUJUAN 4 (PENDIDIKAN)

Goal	Jumlah Indikator			Keterangan	Justifikasi
	SDGs	RPJMN	Belum Tercantum dalam RPJMN		
Goal 4	22	14	7	Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin. Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewarganegaraan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa. Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	On progress: perumusan indikator terkait Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) Dapat diukur dari SUSENAS namun pengukuran ini tidak menggambarkan bahwa orang menggunakan komputer dan mengakses internet dapat dinyatakan terampil TIK. Angka Partisipasi Murni belum dapat menggambarkan permasalahan utuh dari ATS/OOSC, hanya menggambarkan bahwa ada sekian persen dari anak yang tidak berada di layanan pendidikan • Dalam pembahasan Background Study RPJMN 2020-2024, indikator AMH tidak perlu dimasukkan, disebabkan isu buta aksara di Indonesia sudah tidak menjadi permasalahan, dikarenakan kelompok usia buta aksara sebagian besar pada kelompok usia lanjut. AMH usia 15-24: 99,71%, AMH usia 25-59: 97,51%, sementara AMH usia ≥ 60 tahun: 78,99% • Apabila indikator AMH perlu dicantumkan, perumusannya akan spesifik pada usia lanjut. Diperlukan analisis dan review mendalam terkait validitas dan kemudahan pengukuran internalisasi berbagai aspek yang disebutkan dalam Target 4.7 dalam pendidikan, sehingga peserta didik mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terkait. Namun demikian dalam RT RPJMN 2020-2024 upaya ini akan diperkuat melalui pendidikan karakter dan kewarganegaraan, serta internalisasi softskills dalam pembelajaran. Akan diturunkan di target Renstra Kemdikbud dan Kemenag

PENYELARASAN DENGAN SDGs TUJUAN 4 (PENDIDIKAN)

INDIKATOR BARU

TARGET SDG 4	Indikator yang Baru Dikembangkan	STATUS/KETERANGAN
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Tingkat Penyelesaian Sekolah (Persen): a. SD/MI/ sederajat b. SMP/MTs/ sederajat c. SMA/SMK/MA/ sederajat	- Akan dibahas - Sumber data: SUSENAS
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (TK/RA/BA/PAUD) (74,80)	- Sudah dicantumkan dalam Draft RT RPJMN - Sumber data: SUSENAS

PENYELARASAN DENGAN SDGs TUJUAN 4 (PENDIDIKAN)

INDIKATOR BARU

TARGET SDG 4	Indikator yang Baru Dikembangkan	STATUS/KETERANGAN
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	a. Persentase anak tidak sekolah (ATS/OOSC) pada usia jenjang pendidikan dasar dan menengah; b. Indeks Paritas Gender untuk ATS/OOSC pada usia jenjang pendidikan dasar dan menengah;	- Indikator terkait ATS/OOSC belum dicantumkan dalam RPJMN; - Angka Partisipasi belum dapat menggambarkan permasalahan utuh dari ATS/OOSC; - Indikator terkait OOSC diperlukan untuk dapat mengakomodir isu/kendala/hambatan yang dihadapi oleh anak yang menyebabkan anak tidak mendapatkan layanan pendidikan: anak dari keluarga tidak mampu, anak berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, remaja menikah dini, anak terlantar/jalanan, anak berkonflik dengan hukum dan dalam kondisi rentan. - Sumber data: SUSENAS

PENYELARASAN DENGAN SDGs TUJUAN 4 (PENDIDIKAN)

INDIKATOR BARU

TARGET SDG 4	Indikator yang Baru Dikembangkan	STATUS/KETERANGAN
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	a. Persentase siswa usia 13-17 tahun yang mengalami bullying di sekolah. Sumber data: GSHS b. Persentase siswa usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan di sekolah. Sumber data: GSHS	Belum dicantumkan. Selain pengukuran terkait bullying dan kekerasan, DAPODIK Kemdikbud, EMIS Kemenag, serta FORLAP Kemristekdikti juga perlu mengembangkan pengukuran satuan pendidikan yang ramah anak
	a. Persentase siswa usia 13-17 tahun yang mengalami bullying di sekolah. Sumber data: GSHS b. Persentase siswa usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan di sekolah. Sumber data: GSHS	Belum dicantumkan. Selain pengukuran terkait bullying dan kekerasan, DAPODIK Kemdikbud, EMIS Kemenag, serta FORLAP Kemristekdikti juga perlu mengembangkan pengukuran satuan pendidikan yang ramah anak

PEREMPUAN DAN ANAK

PENYELARASAN DENGAN SDGs (KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN)

Goal	Jumlah Indikator		
	SDGs	RPJMN	Belum Tercantum dalam RPJMN
Goal 5	11	10	1 indikator



6 indikator perlu dikembangkan dan belum tersedia datanya:

1. Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.
2. Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.
3. Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.
4. Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (b) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.
5. Proporsi negara dengan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
6. Proporsi Negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.

5 Indikator tidak dimasukkan dalam RPJMN:

1. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan (Indikator bersifat output dan lebih tepat muncul di dalam Renstra K/L)
2. Prevalensi terhadap anak perempuan (Data prevalensi kekerasan terhadap anak belum tersedia secara rutin)
3. Persentase terhadap korban perempuan yang mendapatkan layanan secara komprehensif. (Data layanan komprehensif belum tersedia)
4. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. (Indikator tersebut tidak sensitif untuk melihat akses dan perbaikan pemberdayaan perempuan)

KETENAGAKERJAAN

Goal	Jumlah Indikator		
	SDGs	RPJMN	Belum Tercantum dalam RPJMN
Goal 8	12	6	7 indikator



5 Indikator tidak dimasukkan dalam RPJMN:

Indikator status pekerjaan, upah, dan setengah penganggur sangat bergantung pada berubahnya sifat pekerjaan akibat perkembangan teknologi (*future work*) sehingga tidak dimasukkan dalam RPJMN.



2 indikator perlu dikembangkan dan belum tersedia datanya:

1. Proporsi angkatan kerja (usia 15-24 tahun) yang tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mendapatkan pelatihan.
2. Proporsi dan jumlah pekerja anak (usia 5-17 tahun) yang bekerja di bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak